

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asmara, Galang, 2012, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surabaya: Laksbang Yustisia.
- Atmosudirjo, Prajudi, 1994, *Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azhary, Tahir, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Basah, Sjahran, 1997, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Budiardjo, Miriam, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Darwin, Muhadjir, *Good Governance dan Kebijakan Publik*, Forum LSM DIY: Yappika, 2001.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- H.R., Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Lotulung, Paulus E., 1986, *Seri ke-I Perbandingan Hukum Administrasi – Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Jakarta: Bhuana Pancakarsa.
- Marbun, S.F., 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Makhfudz M., 2013, *Hukum Adminsitrasei Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masthuri, Budhi, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mangkodilaga, Benjamin, 1986, *Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Angkasa.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Grup.
- Mertokusumo, Sudikno, 1983, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Muhjad, M. Hadin, 1985, *Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Mochtar, Zainal Arifin, 2016, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Pope, Jeremy, 1999, *Srategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor

Salman, Otje dan Eddy Damian (Editor), 2018, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung: Alumni.

Sinambela, Lijan Poltak, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi)*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sumardjono, Maria S.W., 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Surachman, R.M. dan Antonius Sujata, 2002, *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional, Sebuah Antologi*, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.

Tjandra, Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Liberty.

Thoha, Miftah, 1991, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Birokrasi*, Yogyakarta: Widya Mandala.

Tim Penyusun Buku Ombudsman Republik Indonesia, 2009, *Ombudsprudensi*, Jakarta: Ombudsman RI.

Wasistiono, Sadu, 2001, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alqa Print.

TESIS

Herry Wibawa, 2010, *Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan PERATUN)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Andi Anas Chaerul, 2020, *Penerapan Ajudikasi Khusus Oleh Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Penyelenggara Negara Yang Maladministrasi*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

Tanti Oktari, “Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Good Governance”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla, 2017.

H.R. Tirajoh, 2019, *Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Pemerintah Daerah*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

JURNAL

Aspani, Budi, “Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004”, Vol. 16, No. 3, September 2018.

Bimasakti, Muhammad Adiguna, “Penyelesaian Sengketa di Ombudsman dan di Pengadilan Mengenai Ganti Kerugian dalam Pelayanan Publik”, *Jurnal Hukum Peratun* 2, No. 2 December 2019.

Enrico Simanjuntak, “Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 3, No. 2, Juli 2014.

HR, Ridwan, dkk, “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, Mei 2018.

Intan Meitasari, Shinta Hadiyantina, Indah Dwi Qurbani, “Urgensi Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 5, No. 1, September 2020.

Solechan, “Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 1 No. 2, Mei 2018.

M, Andi Anas Chaerul, “Penerapan Ajudikasi Khusus Oleh Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Penyelenggara Negara yang Maladministrasi”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020.

Nurtjahjo, Hendra, “Perbedaan Teoritis Antara Lembaga Penyelesaian Kasus Maladministrasi (Ombudsman) dengan Lembaga Peradilan Administrasi”, *Jurnal Selisik*, Vol, 2, No. 4, Desember 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 77.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 No. 139.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 No. 112.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 292.

Peraturan Ombudsman RI No. 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara
Ajudikasi Khusus, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
904.

Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi
Ombudsman Nasional.

RISALAH-RISALAH

Risalah Rapat Panja RUU tentang Ombudsman RI Komisi III DPR RI dengan
Dirjen Perundang-undangan DEPKUMHAM 31 Januari 2007.

Risalah Rapat Panja RUU Ombudsman RI Komisi III DPR RI dengan Dirjen
Perundang-undangan DEPKUMHAM, 7 Maret 2007.

INTERNET

Tim Penyusun KPK, 2019, “*Modul Good Governance*”,
<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-good-governance-aclc-kpk.pdf>

Dhika Kusuma, “Penguatan Ombudsman dinilai kian dibutuhkan”, Artikel 21
Januari 2021, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/379019/penguatan-ombudsman-dinilai-kian-dibutuhkan>

Enrico Simanjuntak, “Potensi persinggungan kewenangan ombudsman dengan
badan peradilan”, Artikel 27 Agustus 2018, Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b83a09e9f6e0/potensi-persinggungan-kewenangan-ombudsman-dengan-badan-peradilan-oleh--enrico-simanjuntak?page=2>

Akbar Tamtomo, “Menangi sengketa informasi ICW desak pemerintah buka
dokumen perjanjian”, Artikel 24 November 2020, Kompas,
<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/24/16383501/menangi-sengketa-informasi-icw-desak-pemerintah-buka-dokumen-perjanjian?page=all>

Abdul Badarudin, “ICW menang gugat Kemenko Perekonomian terkait soal dokumen prakerja”, Artikel 24 November 2020, Utara Times, <https://utaratimes.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1191009147/icw-menang-gugat-kemenko-perekonomian-terkait-soal-dokumen-prakerja?page=2>

Maulandy Rizky, “Menko Airlangga menang lawan ICW di PTUN terkait gugatan kartu prakerja”, Artikel 23 Juli 2021, Liputan 6, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4614256/menko-airlangga-menang-lawan-icw-di-ptun-terkait-gugatan-kartu-prakerja>